



Judul : Bantuan warga miskin disunat oknum kelurahan
Tanggal : Selasa, 18 September 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Curhat Anggota DPR Bantuan Warga Miskin Disunat Oknum Kelurahan

ANGGOTA Komisi V DPR Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat rendah. Sebab dia mendapati tak sedikit oknum pejabat di daerah memberlakukan pemotongan terhadap bantuan biaya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini. Tak tanggung-tanggung, pejabat memungut biaya Rp 500 ribu hingga maksimal Rp 1 juta per Kepala Keluarga.

"Untuk informasi pembiayaan perumahan, saya informasikan ke Dirjen untuk lebih cermati lagi karena yang dapat bantuan itu dikenakan beban Rp 500 ribu sampai 1 juta dari kelurahan," ungkap Ridwan dalam Rapat Kerja bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ridwan mengaku mendengar pungutan tidak resmi ini dari laporan salah satu konstituennya yang juga merupakan penerima bantuan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun yang melakukan pemotongan biaya bantuan tersebut merupakan oknum pejabat kelurahan di Kota Kendari. Hanya saja, Ridwan tidak menyebut secara eksplisit kelurahan yang dimaksud.

"Kami minta pengawasan lebih ditingkatkan lagi karena kasihan masyarakat kita ini sudah miskin, diambil lagi Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per Kepala Keluarga. Itu ada di Sultra, Kota Kendar. Saya ketahui (oknum) ini orang kelurahan. Dia takut sebutkan namanya karena takut nggak

kebagian. Itu saja aspirasi dari kami," tambah dia.

Lain lagi dengan Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing. Anton mengeluh dengan perilaku lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah pemilihannya yang kerap merencanakan bantuan biaya perumahan bagi warga miskin. "Saya sampai pernah ribut dengan awasi itu dan mereka ini LSM," katanya.

Anton menilai kinerja LSM ini malah memperburuk citra dewan. Sebab bantuan perumahan yang diterima masyarakat seakan-akan bukan karena perjuangan para Anggota DPR yang berjuang sedari awal buat masyarakat.

"Mereka citakan seolah-olah ini tak ada urusan dengan DPR. Mereka ini banyak bukan di Sumatera Utara saja. Karena itu tolong satker (satuan kerja) bapak komunikasi terbuka. Kalau bisa sampai Oktober permohonan daftar dan namanya diserahkan ke kami," harap politisi Golkar asal Sumatera Utara ini.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santosa memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian PUPR dalam meningkatkan jumlah bantuan rumah bagi masyarakat miskin. Menurutnya, bantuan tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya kendati jumlahnya masih dirasa masih belum cukup karena kekurangannya masih ada ribuan lagi masyarakat miskin yang memerlukan rumah tempat tinggal.

"Kami berharap untuk 2019 diberikan porsi yang sama dengan 2018. Untuk daerah-daerah yang ada Anggota Komisi V kiranya bisa masuk program strategis sehingga kami bisa yakinkan masyarakat bahwa kami sudah bekerja bantu rakyat sesuai tugas kami," usulnya. ■ KAL